

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pertumbuhan suatu bisnis dan juga perkembangan era globalisasi, persaingan dalam bisnis jasa dan dagang di Indonesia saat ini semakin kuat dan terus meningkat. Hal ini tentunya tidak lepas dari banyaknya perusahaan yang berskala besar maupun kecil. Perkembangan teknologi dan media yang pesat saat ini sangat mempengaruhi banyaknya perusahaan dalam segala bidang bisnis, dagang, ataupun jasa dengan berbagai model pemasaran yang mengikuti perkembangan zaman. Untuk mencapai tujuan tersebut usaha yang akan dilaksanakan adalah setiap perusahaan harus mempersiapkan secara baik untuk kedepannya serta meningkatkan kerja keras secara profesional dalam meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang telah diinginkan bersama. Upaya yang bisa dilakukan ialah dengan menerapkan akuntansi pertanggungjawaban.

Setiap manajer pusat pertanggungjawaban akan membuat keputusan dari pelaksanaan kegiatan pusat-pusat pertanggungjawaban yang berada dibawah pengawasannya dan keputusan ini dilaporkan secara periodik. Setiap pusat pertanggungjawaban akhirnya harus dapat mempertanggungjawabkan setiap pekerjaannya. **Pengertian akuntansi pertanggungjawaban menurut Hansen, dkk sebagai berikut:**

Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur sebagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka.¹

Karakteristik utama akuntansi pertanggungjawaban menurut Hansen, dkk sebagai berikut:

- 1. Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban.**
- 2. Standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggungjawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu.**
- 3. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran**
- 4. Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi.²**

Menurut Salman dan Farid “ **pusat pertanggungjawaban ialah setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab atas aktivitas yang dilakukan oleh unit organisasi yang dipimpinya.**”³ Adapun jenis-jenis pusat pertanggungjawaban menurut salman dan farid yang didasarkan sifat pertanggungjawaban pada biaya atau pendapatan sebagai berikut:

- 1. Pusat biaya**
Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang hanya bertanggungjawab mengendalikan semua biaya yang terjadi di dalam lingkup pusat pertanggungjawaban tanpa menghubungkan dengan pendapatan yang diterima atau diperolehnya.
- 2. Pusat pendapatan**
Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang keluarannya dapat diukur dengan satuan nilai moneter, sedangkan masukannya tidak terukur.
- 3. Pusat laba**

¹ Hansen, dkk., **Akuntansi Manajerial**:Edisi 8, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hal. 116

² Hansen, dkk., **Manajemen Biaya**: Jakarta. Salemba Empat., 2012, hal.231

³ Salman, k.R., & M. Farid., **Akuntansi Manajerial**:Indeks, Jakarta, 2017, hal. 111

Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban dimana baik masukan (biaya yang dikonsumsi) maupun keluarannya (pendapatan yang berhasil dicapai) dapat diukur dengan satuan nilai moneter.

4. Pusat investasi

Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang paling luas dibanding ketiga pusat lainnya, karena manajer punya wewenang mengendalikan pendapatan dan biaya, baik biaya operasional maupun biaya yang timbul sehubungan dengan usaha untuk memperoleh sumber daya dan barang modal yang akan dibeli.⁴

Agar akuntansi pertanggungjawaban dapat dengan mudah dilaksanakan, maka harus memenuhi syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Mulyadi, bahwa syarat-syarat Akuntansi pertanggung jawaban sebagai berikut: **“Struktur organisasi, penyusunan anggaran, penggolongan biaya, sistem kode rekening, dan laporan pertanggungjawaban”⁵**

Fauzan Kurniawan (2017), peneliti terdahulu tentang Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban. Penelitian dilakukan pada Toegoe Photography. Hasil penelitian menunjukkan penetapan tanggung jawab pada Toegoe Photography sudah diberikan secara jelas oleh manajer melalui struktur organisasi yang ada dalam perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban yang baik dapat dilihat dari unsur utama, yaitu penetapan tanggung jawab dan wewenang, standar pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pemberian penghargaan dan hukuman.

Tiara Gustrian (2017) peneliti terdahulu tentang Analisis Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat penilaian Kinerja. Penelitian dilakukan pada PT. Daehan Global. Hasil penelitian menunjukkan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja.

⁴**ibid.** Hal. 112

⁵ Mulyadi, **Sistem Akuntansi**:Edisi ke-3, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal. 78

Menurut Bhandari dkk. (2018), akuntansi pertanggungjawaban dapat dijadikan pengontrol aktivitas perusahaan karena penyimpangan yang terjadi dapat dilaporkan di awal sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan korektif demi rencana masa depan. Pada penelitian ini disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban berisi perbandingan realisasi dan anggaran kinerja.

Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri didirikan atas gagasan dan ide dari seseorang dan didukung 25 sahabatnya. Setelah bekerja selama lebih 20 tahun di PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) dan melihat keadaan perusahaan BAJ yang mulai tidak sehat serta banyaknya anggota khususnya dan masyarakat umumnya yang belum mempunyai pekerjaan, timbul keinginan untuk membuat suatu lapangan kerja. Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri berdiri pada tanggal 22 juni 2009, Unit simpan pinjam dan berkantor pertama di Plaza Metland Tambun Bekasi. Tahun 2021 KSP Makmur Mandiri memiliki kantor cabang sebanyak 154 di 21 Provinsi dan didukung oleh 1.350 karyawan profesional. Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri adalah sebuah badan usaha dalam melakukan pemberian kredit untuk kepada orang banyak, dikarenakan pada pandemi Covid-19 masyarakat banyak mengalami krisis keuangan. Dimana Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri membantu masyarakat banyak dengan cara melakukan pemberian kredit.

Masalah yang ada dikoperasi adalah kinerja manajer Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Medan dalam pemberian kredit, dan SHU berdasarkan anggaran yang ditetapkan belum sepenuhnya terealisasi, seperti tertera pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Pemberian Kredit
Dan Sisa Hasil Usaha(SHU)
Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Medan
Periode Tahun 2021

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	Penyimpangan
Pemberian Kredit	Rp.193.988.665.199	Rp.190.000.000.000	Rp.3.988.665.199
Pendapatan	Rp.19.398.866.519,9	Rp.19.300.000.000	Rp.98.866.519,9
Beban	Rp.13.237.030.346,9	Rp.13.200.000.000	Rp.37.030.346,9
Sisa Hasil Usaha (SHU)	Rp.6.161.836.173	Rp.6.100.000.000	Rp. 61.836.173 (Tidak tercapai)

Sumber: Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri

Dari data pada Tabel 1.1 bahwa penyimpangan anggaran tidak tercapai sebesar Rp. 61.836.173 sehingga perlu pengendalian terhadap penggunaan anggaran oleh kepala cabang, agar dalam operasionalnya dapat mencapai anggaran. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana penyimpangan ini dipertanggungjawabkan oleh pimpinan cabang.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat pentingnya akuntansi pertanggungjawaban, maka penulis melaksanakan penelitian dan membahasnya

dalam tulisan skripsi dengan judul; **AKUNTANSI
PERTANGGUNGJAWABAN PADA KOPERASI SIMPAN
PINJAM MAKMUR MANDIRI CABANG MEDAN.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat di rumuskan masalah penelitian ini adalah: **Bagaimana akuntansi pertanggungjawaban dari segi karakteristik, dan syaratnya diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Medan sebagai pusat laba tahun 2021 ?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian yang dilakukan adalah: **Untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban dari segi karakteristik, dan syaratnya pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Medan sebagai pusat laba pada tahun 2021.**

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Bagi Manajemen Koperasi Makmur Mandiri.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan guna perbaikan atau pemikiran kepada pemimpin koperasi Makmur Mandiri mengenai

penerapan akuntansi pertanggungjawaban dari segi karakteristik, dan syaratnya sebagai pusat laba yang diterapkan koperasi.

2. Bagi penulis,

bahwa penelitian ini diharapkan sebagai salah satu tambahan acuan atau juga sebagai referensi terhadap penelitian yang relevan untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan Akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu Koperasi Makmur Mandiri.

3. Bagi peneliti selanjutnya,

dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya pada topik yang sama dan juga dapat memperluas pengetahuan pembaca tentang akuntansi pertanggungjawaban.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Koperasi

2.1.1 Pengertian dan Tujuan Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation* terdiri dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Maka kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau dapat diartikan sebagai usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dapat dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi bersama, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis dan kekeluargaan.

Menurut Rudianto tentang koperasi sebagai berikut:

Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.⁶

Pengertian Koperasi menurut Hendar:

Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis.⁷

⁶ Rudianto, *Akuntansi Koperasi*:Edisi Ketiga, Erlangga, Jakarta, 2015, Hal. 3

⁷ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi Dengan Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Manajemen Dan Kewirausahaan Koperasi*:Erlangga, Semarang, 2010, hal. 2

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memajukan kesejahteraan anggota atau masyarakat dan mendapatkan keuntungan untuk dibagi secara rata/sama. Menurut Revrissond Baswir secara garis besar tujuan koperasi adalah: **“Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan turut serta membangun tatanan perekonomian.”**⁸

2.1.2 Jenis dan Manfaat Koperasi

Menurut Djoko Muljono jenis koperasi dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Koperasi simpan pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

2) Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi yang mengelola toko serba ada, minimarket, dan sebagainya.

3) Koperasi produsen

Koperasi produsen atau koperasi produksi adalah koperasi yang anggota menghasilkan produk yang kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan milik sendiri.⁹

⁸ Revrissond Baswir, **Koperasi Indonesia**:Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 64

⁹ Djoko Muljono, **Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam**:Andi, Yogyakarta, 2012, Hal. 4

Menurut Djoko Muljono manfaat dari koperasi, terutama Koperasi Simpan Pinjam(KSP), yang dapat diperoleh para anggota antara lain:

- 1) **Memberi kemudahan anggota untuk memperoleh modal usaha.** Karena persyaratan meminjam pada koperasi simpan pinjam relatif lebih mudah dibanding meminjam kepada lembaga keuangan lain, termasuk bank maupun BPR. Namun demikian kemudahan persyaratan peminjaman tersebut tidak harus menghilangkan kehati-hatian pengurus melalui karyawan koperasi dalam menyalurkan kredit kepada nasabah, baik kepada anggota maupun calon anggota. Dengan demikian ke KSP membuat anggota lebih mudah memperoleh modal kerja sesuai waktu yang diharapkan. Dengan demikian anggota tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan laba dari usaha yang dijalankannya.
- 2) **Memberi keuntungan kepada anggota melalui Sisa Hasil Usaha (SHU)** keuntungan koperasi yang diterima yang masing-masing anggota sangat dimungkinkan untuk tidak sama karena penerimaan SHU dikaitkan dengan peran anggota terhadap koperasi. Besarnya ditentukan oleh proporsi besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib, simpanan lainnya, serta aktivitas peminjaman, dan peran lainnya.
- 3) **Mengembangkan usaha anggota koperasi.** Mengembangkan usaha anggota koperasi merupakan tujuan utama koperasi simpan pinjam karena pinjaman yang dilakukan anggota bukan ditujukan untuk keperluan konsumtif, melainkan untuk modal kerja.
- 4) **Meniadakan praktek rentenir.** Tujuan utama KSP adalah meniadakan praktek rentenir. Pengertian rentenir adalah pinjaman dengan bunga sangat tinggi.¹⁰

2.1.3 Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting yang dimiliki suatu organisasi karena memiliki fungsi-fungsi manajemen sehingga suatu organisasi dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Medan, Maka struktur organisasi adalah sebagai berikut:

¹⁰Ibid, hal. 5.

1. Pembina
2. Ketua Umum
3. Pengawas
4. Manager
5. Wakil Manager
6. Kasir
7. Administrasi
8. Marketing

2.2 Konsep Akuntansi Pertanggungjawaban

2.2.1 Pengertian Akuntansi dan Akuntansi Pertanggungjawaban.

Akuntansi merupakan sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga untuk menentukan keputusan. Selain itu ada juga pengertian akuntansi menurut beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Harrison Jr, Walter, dkk.. tentang akuntansi ialah:

Akuntansi merupakan sistem akuntansi informasi, yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis.¹¹

¹¹ Harrison Jr, Walter T, dkk.. **Akuntansi Keuangan IFRS**:Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 3

Sedangkan menurut Tulis S. Meliala, dkk mengemukakan: **“Akuntansi adalah suatu sistem informasi mengidentifikasi, pencatatan, klasifikasi, dan mengkomunikasikan kegiatan perusahaan.”**¹²

Dari beberapa pendapat tentang pengertian akuntansi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan ilmu yang mengolah data, proses mengetahui informasi, pengidentifikasian/pengenalan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi akuntansi ekonomi yang diharapkan berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan.

Beberapa definisi yang ditemukan oleh para ahli mengenai akuntansi pertanggungjawaban pada dasarnya mengandung pengertian yang sama. Beberapa definisi akuntansi pertanggungjawaban antara lain sebagai berikut :

Menurut Rimbun Sidabutar mengemukakan:

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu bidang dari akuntansi manajemen yang dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki oleh setiap manajer atau dengan kata lain akuntansi pertanggungjawaban merupakan media pengendalian biaya atau pendapatan dengan tempat dimana biaya atau pendapatan tersebut dikeluarkan atau diperoleh oleh penanggungjawab dari tempat tersebut.¹³

Menurut Rudianto mengemukakan bahwa :

Akuntansi pertanggungjawaban (*responsibility accounting*) adalah sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat-pusat tanggung jawab pada keseluruhan organisasi dan mencerminkan rencana dan tindakan setiap pusat tanggung jawab itu dengan menetapkan

¹² Tulis S. Meliala, dkk, **Akuntansi Sektor Publik**: Edisi Ketiga, Semesta Media, Jakarta, 2011, hal. 3

¹³ Rimbun C.D. Sidabutar, **Akuntansi Keprilakuan**: Edisi Kedua, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2017, hal. 79

penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggung jawab yang bersangkutan.¹⁴

Dari beberapa definisi para ahli tentang pengertian akuntansi pertanggungjawaban dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang dirancang dan realisasi pusat pertanggungjawaban serta sarana untuk menilai prestasi atau kinerja untuk mengumpulkan suatu data, melaporkan data informasi dan melaporkan data operasi keuangan (harta, pendapatan, dan biaya) sesuai dengan tempat pertanggungjawaban.

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi Pertanggungjawaban tentunya memiliki tujuan dan manfaat bagi koperasi yang menerapkannya. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban ialah untuk mengajak para karyawan untuk melakukan pekerjaan yang benar serta dapat bertanggungjawab atas penyimpangan biaya maupun penghasilan (pendapatan) koperasi. Adapun keuntungan dari akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri adalah individu dalam organisasi itu ikut berperan serta mencapai target koperasi secara lebih baik dari tahun sebelumnya.

Menurut Hansen, dkk, **“akuntansi pertanggungjawaban bertujuan mempengaruhi perilaku dalam cara tertentu sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama”**.¹⁵ Baldric Siregar, dkk berpendapat bahwa akuntansi pertanggungjawaban bertujuan

¹⁴ Rudianto, **Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategi**: Erlangga, Jakarta, 2013, hal. 176

¹⁵ **Ibid.** Hal. 229

“ untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya organisasi.”¹⁶

Sedangkan beberapa tujuan akuntansi pertanggungjawaban lainnya menurut Hidayat dan Tin adalah sebagai berikut :

- 1. Dapat digunakan sebagai salah satu alat perencanaan untuk mengetahui kriteria-kriteria penilaian prestasi unit usaha tertentu.**
- 2. Dapat digunakan sebagai pedoman penting langkah yang harus dibuat oleh perusahaan dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan.**
- 3. Dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam rangka penilaian kinerja (performance) bagian-bagian yang ada dalam perusahaan, karena secara berkala top manajemen menerima laporan pertanggungjawaban dari setiap tingkatan manajemen dan top manajer dapat menilai performance dari setiap bagian dilihat dari ditetapkan untuk setiap bagian yang menjadi tanggungjawabnya.**
- 4. Membantu manajemen dalam pengendalian dengan melihat penyimpangan realisasi dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan.¹⁷**

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan aset, pendapatan atau biaya yang dihubungkan dengan kepala cabang yang bertanggung jawab terhadap pusat pertanggungjawaban tertentu. Informasi ini dapat berupa informasi historis yang berupa aset, pendapatan dan/atau biaya masa lalu, dan dapat pula berupa informasi masa yang akan datang

¹⁶ Baldric Siregar, dkk., **Akuntansi Manajemen**: Salemba Empat, Jakarta, 2013, hal. 172

¹⁷ Taufik Hidayat dan tin., Se., **Analisis Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajer Pusat Laba di Warung Paskal Bandung**, Jurnal Akuntansi, Vol.4 No.2:187-199, 2012

Menurut Hansen,dkk, tentang manfaat dari akuntansi pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. **Untuk penyusunan anggaran**
Akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat untuk memperjelas peran seorang manajer sebab dalam penyusunan anggaran ditetapkan siapa atau pihak mana yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan perusahaan, juga ditetapkan sumber daya yang disediakan bagi pemegang tanggung jawab tersebut.
2. **Penilaian kerja manajer pusat pertanggungjawaban.**
Manajer pusat pertanggungjawaban akan diberi wewenang dalam menjalankan tanggung jawab dan pencapaian sasaran yang diberikan oleh manajemen puncak. Pada akhir periode yang telah ditentukan,manajer pusat pertanggungjawaban harus melaporkan pertanggungjawaban atas kinerja mereka selama periode tersebut. Adanya tanggungjawab dan sasaran yang jelas, maka kinerja manajer akan lebih mudah dinilai.
3. **Sebagai motivator manajer.**
Akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan untuk memotivasi manajer dalam melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan atau prestasi yang tidak memuaskan. Sistem yang digunakan untuk memotivasi manajer dalam akuntansi pertanggungjawaban adalah penghargaan dan hukuman.¹⁸

2.3. Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban

Karakteristik akuntansi pertanggungjawaban dianggap perlu menjadi fokus perhatian, karena proses pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan bermanfaat dalam proses ini, karena itu termasuk dalam pertanggungjawaban mereka.

Menurut Hansen, dkk, tentang karakteristik akuntansi pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. **Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban.**
Akuntansi pertanggungjawaban mengidentifikasi pusat pertanggungjawaban sebagai unit organisasi seperti departemen, keluarga produk, tim kerja atau individu.

¹⁸ Op. Cit. hal.8-9

2. **Standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu.**
Setelah pusat pertanggungjawaban diidentifikasi dan ditetapkan, sistem akuntansi pertanggungjawaban menghendaki ditetapkan biaya standar sebagai dasar untuk menyusun anggaran.
3. **Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran.**
Pelaksanaan anggaran merupakan penggunaan sumber daya oleh manajer pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Penggunaan sumber daya ini diukur dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran anggaran.
4. **Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi.**
Sistem penghargaan dan hukuman dirancang untuk memacu para manajer dalam mengelola biaya untuk mencapai target standar biaya yang dicantumkan dalam anggaran.¹⁹

Karakteristik akuntansi pertanggungjawaban di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban.
Akuntansi pertanggungjawaban mengidentifikasikan pusat pertanggungjawaban sebagai unit organisasi seperti departemen, tim kerja atau individu. Apapun satuan pusat pertanggungjawaban yang dibentuk, sistem akuntansi pertanggungjawaban menbebaskan tanggungjawab kepada individu yang diberi wewenang. Tanggung jawab dibatasi dalam satuan keuangan (biaya).
2. Standar yang ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggungjawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu.
Setelah pusat pertanggungjawaban diidentifikasi dan ditetapkan, sistem akuntansi pertanggungjawaban menghendaki ditetapkan biaya standar

¹⁹ **Ibid.** Hal. 479

sebagai dasar untuk menyusun anggaran. Anggaran berisi biaya standar yang ditetapkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Biaya standar dan anggaran merupakan ukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.

3. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran.

Pelaksanaan anggaran merupakan penggunaan sumber daya oleh manajer pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Penggunaan sumber daya ini diukur dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran anggaran. Dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban, secara prinsip individu hanya dimintai pertanggungjawaban atas biaya dan memiliki wewenang untuk mempengaruhi secara signifikan. Informasi akuntansi pertanggungjawaban menyajikan informasi biaya sesungguhnya dan informasi biaya yang dianggarkan kepada setiap manajer yang bertanggung jawab, untuk memungkinkan setiap manajer mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran mereka dan memungkinkan mereka untuk memantau pelaksanaan anggaran mereka.

4. Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi.

Sistem penghargaan dan hukuman dirancang untuk memacu para manajer dalam mengelola biaya untuk mencapai target standar biaya yang

dicantumkan dalam anggaran. Atas dasar evaluasi penyebab terjadinya penyimpangan biaya yang direalisasikan dari biaya yang dianggarkan, para manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman menurut sistem penghargaan dan hukuman yang ditetapkan.

2.4 Syarat-syarat Akuntansi Pertanggungjawaban

Syarat akuntansi pertanggungjawaban dapat dikatakan berhasil jika rencana (anggaran) yang disusun oleh manajemen dapat direalisasikan. Dalam penerapannya, Akuntansi pertanggungjawaban harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat terlaksana dengan baik .

Berikut ini lima (5) syarat akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi sebagai berikut:

- 1. Struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan tanggungjawab tiap tingkatan manajemen.**
- 2. Anggaran biaya yang disusun untuk tiap angkatan manajemen.**
- 3. Penggolongan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya (*controllability*) biaya oleh manajemen tertentu dalam operasi.**
- 4. Terdapat susunan kode rekening perusahaan yang dikaitkan dengan kewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban.**
- 5. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggungjawab (*Responsibility Reporting*).²⁰**

Kelima syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban disingkat menjadi: (1) Struktur Organisasi, (2) penyusunan Anggaran, (3) Penggolongan Biaya, (4) Kode rekening, dan (5) Laporan Pertanggungjawaban. Syarat-syarat yang telah diuraikan sebelumnya dalam menerapkan akuntansi pertanggungjawaban yang baik harus memiliki standar yang telah ditentukan dan jika ternyata salah satu

²⁰ **Op.Cit.** hal.191

syarat diatas tidak terpenuhi maka harus dilakukan perbaikan-perbaikan untuk menyempurnakannya.

Sedangkan menurut Rudianto, untuk membangun sistem akuntansi pertanggungjawaban yang baik diperlukan serangkaian persyaratan yang saling terkait satu sama lain. Berikut beberapa syarat untuk membentuk dan menetapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. **Alokasi dan pengelompokan tanggungjawab.**
Sistem akuntansi pertanggungjawaban harus didasarkan atas alokasi dan pengelompokan tanggungjawab manajerial pada berbagai unit dan tingkatan dalam organisasi dengan tujuan untuk membentuk anggaran bagi masing-masing unit kerja tersebut.
2. **Sesuai bagan organisasi.**
Sistem akuntansi pertanggungjawaban harus disesuaikan dengan struktur organisasi dimana ruang lingkup telah ditentukan. Wewenang mendasari pertanggungjawaban biaya tertentu.
3. **Anggaran yang jelas.**
Anggaran yang disusun harus menunjukkan secara jelas biaya yang terkendali oleh personel unit kerja bersangkutan. Jadi, setiap personel unit kerja yang diberikan wewenang mengelola unit kerjanya harus mengetahui dengan jelas tingkat tanggungjawab yang menjadi bebannya.²¹

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban merupakan di koperasi adalah adanya garis wewenang, tanggungjawab yang jelas pada setiap tingkatan manajemen dalam koperasi yang terstruktur bagan organisasi dan penyusunan anggaran di setiap tingkatan manajemen sehingga dapat mempermudah pelaporan kinerja pertanggungjawaban pada tingkat manajemen atas.

²¹ Rudianto, **Penganggaran**:Erlangga, Jakarta, hal. 176

2.4.1 Struktur Organisasi

Informasi akuntansi pertanggungjawaban selalu dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap kepala cabang yang ada dalam koperasi, oleh karena itu setiap kepala cabang dalam organisasi bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berada dibawah wewenangnya. Dengan kata lain, kepala cabang yang diserahkan wewenang dari pimpinan pusat koperasi mempertanggungjawabkan kinerjanya pada pimpinan pusat koperasi tersebut. Koperasi sebagai suatu organisasi harus memiliki struktur organisasi yang disusun sedemikian rupa sehingga wewenang dan tanggungjawab setiap kepala cabang menjadi lebih jelas.

Struktur organisasi merupakan pengaturan garis tanggungjawab dalam satu entitas yang disusun untuk mencapai tujuan bersama orang-orang yang berada pada jajaran garis tersebut. Struktur organisasi dalam akuntansi pertanggungjawaban menunjukkan bahwa tiap-tiap pimpinan jelas atas segala kegiatan yang berada dibawah pengendaliannya. Struktur organisasi merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban dan penentuan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Terdapat 2 tipe struktur organisasi yang berkaitan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban, yaitu organisasi fungsional dan organisasi divisonal.

1. Organisasi Fungsional

Dalam organisasi fungsional , pembagian pusat pertanggungjawaban didasarkan atas fungsi, yaitu produksi, fungsi penjualan (pemasaran), fungsi administrasi.

2. Organisasi Divisional

Dalam organisasi divisional, pembagian didasarkan pada divisi-divisi penghasilan laba. Dalam hubungan dengan pusat pertanggungjawaban, struktur organisasi harus dianalisis mengenai kemungkinan adanya kelemahan dalam pendelegasian wewenang. Pada akhirnya, struktur organisasi yang sesuai dengan konsep akuntansi pertanggungjawaban adalah struktur yang memberikan peluang bagi bawahan untuk otonomi (desentralisasi) dan yang memisahkan dengan jelas wewenang dan tanggungjawab masing-masing bagian yang ada.

2.4.2 Penyusunan Anggaran

Salah satu tujuan utama pada koperasi ialah untuk memperoleh laba maksimum. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan suatu alat perencanaan dan pengendalian biaya yang tepat agar sumber daya koperasi dapat dimanfaatkan secara lebih baik dari sebelumnya. Salah satu alat perencanaan dan pengendalian ialah anggaran. Anggaran menghendaki adanya organisasi yang baik, tiap-tiap kepala cabang mengetahui wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing. Dengan demikian jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang direncanakan atau diinginkan dalam anggaran, akan mudah ditunjuk siapa yang bertanggungjawab.

Menurut Anthony dan Govindarajan yang dialih bahasakan oleh Kurniawan dan krista, **“Anggaran didefinisikan sebagai alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi”**.²²

Anggaran memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan koperasi di masa yang akan datang.
3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam koperasi dan yang menghubungkan kepala cabang dan manajer.
4. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sebenarnya.
5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi koperasi.
6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi kepala cabang dan karyawan agar senantiasa bertindak secara lebih baik sesuai dengan tujuan organisasi.

Menurut Anthony dan Govindarajan, berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban, anggaran dibagi menjadi tiga jenis:

1. Anggaran biaya

Anggaran biaya dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu:

- a. Anggaran yang menyangkut pengeluaran terukur (*engineered expenses*) di pusat tanggung jawab, di mana keluaran dapat diukur.**

²²Anthony, Robert N., dan Vijay Govindarajan.. *Management Control System*:Salemba Empat, Jakarta, 2012, hal. 73

- b. Anggaran yang menyangkut pengeluaran diskresioner (*discretionary expenses*) di pusat tanggung jawab, di mana keluaran tidak dapat diukur.
2. Anggaran pendapatan
Anggaran pendapatan mempunyai karakteristik berikut, yaitu:
 - a. Anggaran ini dirancang untuk mengukur efektifitas pemasaran.
 - b. Manajer pemasaran tidak dapat dituntut untuk sepenuhnya bertanggung jawab atas pencapaian sasaran yang dianggarkan seperti halnya dengan anggaran biaya.
 3. Anggaran laba
Anggaran laba divisi digunakan oleh manajemen puncak:
 - a. Untuk mereview untuk kerja keuangan koperasi total yang diharapkan untuk tahun mendatang dan untuk mengambil tindakan tertentu bila unjuk kerja tersebut tidak memuaskan.
 - b. Untuk merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan keseluruhan koperasi.
 - c. Untuk berperan serta dalam perencanaan divisi.
 - d. Untuk ikut mengendalikan, setidaknya-tidaknya sebagian divisi anggaran disusun untuk memenuhi berbagai tujuan tertentu.²³

Dalam akuntansi pertanggungjawaban setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kerjanya. Kegiatan tersebut mengarah pada pencapaian tujuan bersama, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu serta sumber daya (seperti: tenaga kerja, peralatan, dan dana) dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Adapun syarat-syarat untuk anggaran yang baik sebagai berikut:

1. Organisasi yang sehat: organisasi yang membagi tugas fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab yang tegas.
2. Sistem akuntansi yang memadai adalah sistem akuntansi yang meliputi:
 - a. Laporan yang didasarkan kepada akuntansi pertanggungjawaban.

²³ **Ibid.** Hal. 171

- b. Pencatatan akuntansi memberikan informasi mengenai realisasi anggaran.
 - c. Penggolongan rekening yang sama antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat diperbandingkan dan dihitung penyimpangannya.
3. Penilaian dan analisa laporan diperlukan untuk menetapkan alat pengukur prestasi sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisa prestasi.

2.4.3 Penggolongan Biaya

Di dalam akuntansi pertanggungjawaban, tiap kepala cabang berpartisipasi dalam menyusun anggaran biaya bagiannya masing-masing dan oleh karena itu masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban mengenai realisasi anggaran tersebut. Namun tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian dapat dikendalikan oleh kepala cabang, maka hanya biaya-biaya terkendalikannya saja yang harus dipertanggungjawabkan olehnya. Pemisahan biaya ke dalam biaya terkendalikannya dan tidak terkendalikannya perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban.

Menurut Daljono dalam penelitian Fadhilah, bahwa **“Biaya terkendali adalah biaya dimana manajer dapat mempengaruhi ada tidaknya dan besar kecilnya biaya tersebut. Apabila seorang manajer tidak dapat mempengaruhi suatu biaya tak terkendali bagi manajer tersebut”**.²⁴

Menurut Mulyadi juga mengemukakan bahwa biaya tidak terkendalikannya dapat diubah menjadi biaya terkendalikannya melalui dua cara yang saling berkaitan:

1. Mengubah dasar pembebanan dari alokasi ke pembebanan langsung.

²⁴ Daljono, **Akuntansi Biaya**: Edisi 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, Hal. 37

2. Mengubah letak tanggung jawab pengambilan keputusan.

2.4.4 Kode Rekening

Biaya yang terjadi harus diklasifikasikan dan diberi kode rekening sesuai dengan pusat-pusat pertanggungjawaban. Kode adalah suatu kerangka yang menggunakan angka, huruf, atau kombinasi keduanya antara angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Pembuatan kode dapat mempermudah proses pencarian perkiraan yang diinginkan, pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan data akuntansi. Setiap tingkatan manajemen merupakan pusat pertanggungjawaban dan akan dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi didalamnya yang dipisahkan antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali.

Menurut Mulyadi ada lima metode pemberian kode rekening sebagai berikut:

- 1. Kode angka atau alfabet urut**
Dalam metode pemberian kode ini, rekening diberi kode angka atau huruf yang berurutan. Contohnya kode rekening 1 untuk kas, 2 untuk investasi, 3 untuk piutang.
- 2. Kode angka blok**
Metode pemberian kode ini, rekening dikelompokkan menjadi beberapa golongan dan setiap golongan disediakan satu blok angka yang berurutan untuk memberi kodenya. Contoh kode akun 1-24 untuk Aktiva lancar, kode akun 25-39 untuk akun investasi jangka panjang.
- 3. Kode angka kelompok**
Kode Kelompok ini terbentuk dari dua atau lebih subcodes yang dikombinasikan menjadi satu kode. Umumnya memiliki karakteristik yaitu rekening diberi kode angka atau kombinasi angka dan huruf, jumlah angka atau huruf dalam kode tetap, posisi angka dan atau huruf memiliki arti tertentu, dan perluasan klasifikasi dilakukan dengan memberi cadangan angka dan atau huruf ke kanan. Contoh 1101 untuk kas, 1102 untuk piutang, 1103 untuk persediaan.
- 4. Kode angka desimal**

Kode angka desimal memberi kode angka terhadap klasifikasi yang membagi kelompok menjadi maksimum 10 golongan yang lebih kecil dari subkelompok tersebut. sebagai contoh kode 1 untuk prsediaan, kode 1.1 untuk persediaan suku cadang, kode 1.2 untuk persediaan bahan penolong.

5. Kode angka urut didahului dengan huruf

Metode ini menggunakan kode berupa kombinasi angka dengan huruf. Contohnya AL 101, AATL 112, MO 245.²⁵

2.4.5 Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban merupakan sebuah hasil-hasil yang dicapai oleh seorang manajer pusat pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya selama periode tertentu. Bagian akuntansi biaya setiap 3 bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk tiap-tiap pusat biaya. Setiap 3 bulan dibuat rekapitulasi biaya atas dasar total biaya bulan lalu, yang tercantum dalam kartu biaya. Atas dasar rekapitulasi biaya disajikan laporan pertanggungjawaban biaya. Isi dari laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya.

Secara umum, tujuan dari laporan pertanggungjawaban adalah untuk memberikan informasi kepada para pemimpin tentang hasil-hasil pelaksanaan suatu pekerjaan yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya dan memberikan motivasi kepada kepala cabang untuk mengambil satu tindakan dalam upaya meningkatkan hasil.

Format umum laporan pertanggungjawaban biaya. Laporan pertanggungjawaban biaya berisi informasi berikut:

1. Nomor kode rekening biaya.
2. Jenis biaya atau pusat pertanggungjawaban.

²⁵ **OP.Cit.** hal. 128-138

3. Realisasi biaya bulan ini.
4. Anggaran biaya bulan ini.
5. Penyimpangan biaya bulan ini.
6. Realisasi biaya sampai dengan bulan ini.
7. Anggaran biaya sampai dengan bulan ini.
8. Penyimpangan biaya sampai dengan bulan ini.

Dengan diterapkannya syarat-syarat tersebut maka akuntansi pertanggungjawaban akan dapat dilaksanakan pada koperasi. Akuntansi pertanggungjawaban yang baik harus memenuhi persyaratan yang telah dicantumkan diatas.

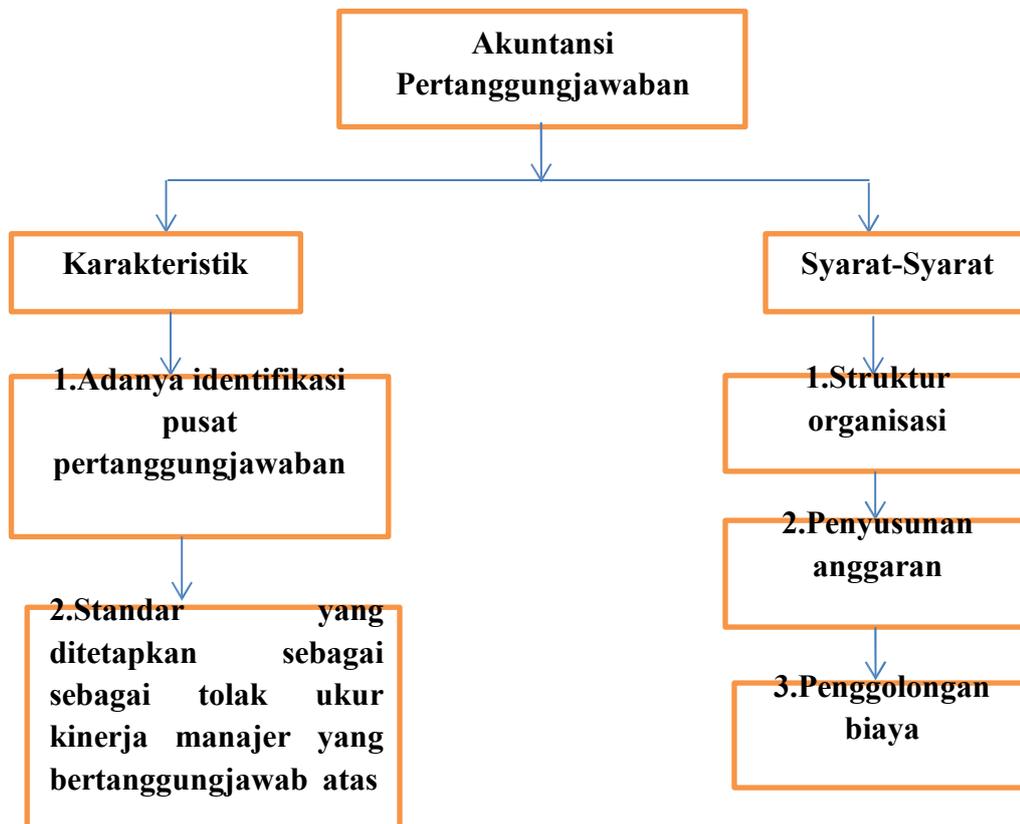
2.5. Kerangka Berfikir.

Untuk menghasilkan pembahasan yang terarah maka perlu dibuat kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir dalam pembahasan skripsi ini tertera pada Gambar 2.1. Dari gambar 2.1 dapat dibuat penjelasan sebagai berikut:

Setiap koperasi atau organisasi perlu menerapkan akuntansi pertanggungjawaban, karena koperasi pada umumnya menetapkan pembagian tugas-tugas organisasi dengan diberikan wewenang dan tanggungjawab secara jelas dan tegas. Dalam akuntansi pertanggungjawaban perlu diperhatikan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban seperti adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban, standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggungjawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu, kinerja manajer diukur dengan

membandingkan realisasi dengan anggaran, dan manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi.

Pada identifikasi pusat pertanggungjawaban didesentralisasikan kepada bagian yang ada dibawahnya supaya mudah dalam pembagian tugas tanggung jawab. Standar ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja manajer yang bertanggungjawab atas pertanggungjawaban biaya standar dan anggaran. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran, manajer yang bertanggungjawab atas unit organisasi yang dipimpinnya berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban atas wewenang yang dimilikinya. Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban pemberian penghargaan dan hukuman didesain yang diharapkan dapat memberikan motivasi lebih kepada





Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah penulis.

Manajer dan seluruh karyawan Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri. Akuntansi pertanggungjawaban akan berjalan lebih baik apabila keempat karakteristik tersebut terlaksana secara sistematis dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Selain itu agar akuntansi pertanggungjawaban dapat berhasil juga harus memenuhi syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban yang terdiri dari: (1) Struktur organisasi, (2) Penyusunan anggaran, (3) Penggolongan biaya, (4) Kode rekening, dan (5) Laporan pertanggungjawaban.

Pada struktur organisasi juga harus menggambarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk mengendalikan suatu organisasi. Penyusunan anggaran

merupakan perencanaan dan pengendalian untuk memperoleh laba. Penggolongan biaya terbagi menjadi 2 bagian yaitu: (1) Biaya terkendali, dan (2) Biaya tak terkendali. Biaya terkendali adalah biaya yang dapat secara langsung dipengaruhi oleh manajer dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan biaya tak terkendali adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang pemimpin/jabatan tertentu berdasarkan wewenang yang dia miliki atau tidak dapat dipengaruhi oleh seorang pejabat dalam waktu tertentu. Kode rekening ialah suatu yang menggunakan angka, huruf, atau kombinasi keduanya antara angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Laporan pertanggungjawaban adalah untuk memberikan informasi kepada para pimpinan tentang hasil-hasil pelaksanaan suatu pekerjaan yang berada dalam lingkup tanggungjawabnya dan memberikan motivasi kepada manajer untuk mengambil suatu tindakan dalam upaya meningkatkan hasil.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji, ataupun bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan berdasarkan data atau informasi yang telah didapatkan, kemudian dikumpulkan, diklasifikasi, dan diinterpretasikan sehingga didapatkan informasi yang diperlukan untuk menganalisa masalah yang ada, akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang relevan. Menurut Moleong Pengertian penelitian kualitatif merupakan:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁶

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Hendryadi dan Suryani **yaitu:**

“Penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami.”²⁷

²⁶ Moleong, L.J., **Metode Penelitian Kualitatif**:PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, Hal. 6

²⁷ Hendryadi dan Suryani, **Metode Riset Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam**: Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2015, Hal.218

Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang diambil atau dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari observasi langsung, study pustaka dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses yang bagus.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, tidak dikenal dengan populasi dan sampel seperti dalam penelitian kuantitatif karena penelitian berangkat dari kasus keberadaan individu atau kelompok dalam situasi sosial tertentu dan hasilnya hanya berlaku pada situasi sosial itu. Menurut Arikunto **“subjek penelitian adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.”**²⁸ Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Medan Jl.Kl.Yos Sudarsono Km.12,5 No.45 Kel.Titi Papan Kec. Medan Deli.

3.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti saat ini ialah Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Medan Jl.Kl.Yos Sudarso Km.12,5 NO.45 Kel.Titi Papan Kecamatan Medan Deli.

²⁸ Arikunto, Suharsimi, **Prosedur Penelitian:**Rineka Cipta, Jakarta, 2016, Hal.26

3.3 Jenis dan Metode pengumpulan Data

3.3.1 Jenis Data

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data ini ialah hasil wawancara mengenai sistem penilaian kinerja perusahaan pada pihak-pihak terkait.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau metode pengumpulan data, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai perusahaan dan masalah-masalah khusus yang sedang diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen. Menurut Sugiyono **“dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah diteliti.”**²⁹

²⁹ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D:CV. Alfabeta**, Bandung, 2017, hal. 240

Dokumentasi yang dilakukan penelitian ini dengan mencatat realisasi dan anggaran tahun 2021 di Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Cabang Medan. Kode rekening tidak dimiliki Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri, tetapi kode cabang Medan 0070 dengan password 123654. Pemberian penghargaan yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Cabang Medan ialah kenaikan gaji, mendapat bonus, hadiah dan promosi pangkat/jabatan. Sedangkan hukuman yang diberikan antara lain surat peringatan, pergantian posisi jabatan, penundaan peningkatan gaji/promosi jabatan, serta peringatan.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui penerapan karakteristik, dan syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban yang ada pada Koperasi Makmur Mandiri. Dengan demikian dapat diketahui gambaran umum sebagai kesimpulan atas penerapan akuntansi pertanggungjawaban, sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.